

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam menempatkan zakat sebagai pengejawantahan nilai kegotong royongan manusia antara kalangan mempunyai dan yang papa. Sebagaimana yang termuat pada tafsir *Al-Misbah* karya Quraisy Shihab bahwa diantara landasan filosofi zakat memuat tentang solidaritas sosial dan persaudaraan.¹ Kehadiran zakat dapat digunakan sebagai jaminan sosial untuk menggeliatkan upaya mensejahterakan masyarakat yang masih menjadi pekerjaan rumah di negeri ini.

Peranan zakat diwujudkan dengan cara dihimpun dan diberdayakan. Kegiatan tersebut hanya dapat terjadi ketika adanya sebuah pengelolaan. Urgensi pengelolaan akan menentukan hasil dari besaran zakat yang mampu dihimpun dan program pemberdayaan yang dapat dilakukan. Ukuran ini yang akan menuntun perkembangan dan perbaikan pengelolaan zakat supaya manifestasi zakat benar-benar nyata dan mampu menanggulangi permasalahan sosial dan mewujudkan kesejahteraan.

Kehadiran organisasi pengelola zakat di Indonesia adalah satu bentuk jawaban. Sebagaimana ungkapan Nur Kholis, dkk dalam tulisannya berjudul potret filantropi Islam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan bahwa tahun 1990 menjadi titik awal filantropi Islam mulai bermunculan dan terus berkembang sangat baik hingga sekarang ini.²

Keseriusan ini dibuktikan dengan adanya undang-undang yang mengatur seputar perzakatan, yaitu di dalam UU No. 23 Tahun 2011. Mengetahui bahwa zakat seharusnya menjadi sumber yang cukup potensial dalam mengatasi

¹ Fitri Kurniawati, "Filosofi Zakat dalam Filantropi Islam." *ADZKIYA Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no 2 (2017): 249. Diakses pada 8 April 2020 melalui <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/1036>.

² Nur Kholis, dkk "Potret Filantropi Islam Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta." *La Riba Jurnal Ekonomi Islam* 7, no.1 (2013): 62, diakses pada 8 April 2020 melalui <https://media.neliti.com/media/publications/26076-ID-potret-filantropi-islam-di-propinsi-daerah-istimewa-yogyakarta.pdf>.

problem kemiskinan, maka dalam undang-undang telah membentuk BAZNAS yang memiliki wewenang dalam pengelolaan zakat.³ Didalamnya tercantum maksud diadakannya sebuah pengelolaan untuk memaksimalkan kemanfaatan zakat dalam mensejahterakan masyarakat dengan mendorong keefektifan dan efisiensi pelayanan pada pengelolaan zakat.⁴

Potensi zakat akan tergali secara maksimal ketika pengelolaan dilakukan dengan maksimal pula. Aspek-aspek penting mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, serta pelaporan perlu mendapatkan porsi dan perlakuan yang sama pentingnya. Indria Fitriani bersama temannya dalam judul tantangan pengelolaan dana zakat di Indonesia dan literasi zakat bahwa data BAZNAS pada tahun 2017 zakat memiliki potensi pengumpulan mencapai 217 triliun namun baru berhasil tergali cukup pada angka 5 triliun saja. Hal tersebut terjadi karena terdapat kendala dalam pengelolaan zakat, seperti kurangnya perencanaan yang strategis, rendahnya komitmen pengelola terhadap organisasi pengelola zakat dan belum dapat mengantongi kepercayaan masyarakat secara penuh.⁵

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan institusi pengelola yang terbentuk dari organisasi masyarakat (ormas), yayasan atau institusi lainnya diakui dan mendapat perlindungan hukum, dengan catatan harus dikukuhkan terlebih dahulu oleh pemerintah sebagaimana yang termuat dalam UU Nomer 38 tahun 1999 maupun perubahannya pada UU Nomer 23 tahun 2011 dimana posisinya berada dalam pengawasan BAZNAS.⁶ Keberadaan LAZ memiliki urgensi dalam

³ Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2011, diakses pada 16 April 2020 melalui <https://jatim.kemenag.go.id>.

⁴ Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2011, diakses pada 16 April 2020 melalui <https://jatim.kemenag.go.id>.

⁵ Indria Fitri Afiyana, dkk “Tantangan Pengelolaan dana Zakat di Indonesia dan Literasi Zakat” *Jurnal Akuntabel* 16 no.2 (2019): 223, diakses pada 9 April 2020 melalui <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL/article/view/6013>.

⁶ Ramadhita, “Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial” *Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah* 3 no. 1 (2012):33, diakses pada 15 April 2020 melalui <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/download/2182/pdf>.

menumbuhkan kesadaran *muzakki* untuk menyalurkan dana ZIS kepada LAZ dan mendayagunakannya kepada para *mustahik* dengan tujuan dikemudian hari *mustahik* mampu menghadapi persoalan sosio ekonomi secara mandiri.

Semangat LAZ dalam menumbuhkan kesadaran akan potensi zakat dalam mensejahterakan masyarakat dibuktikan dengan banyaknya LAZ yang selalu berusaha berbenah diri. Sari Viciawati Machdum dengan judul upaya peneguhan eksistensi LAZ sebagai salah satu bentuk *Faith Based Organization* di Indonesia menyebutkan bahwa semangat kuat ditunjukkan oleh LAZ Dompot Dhuafa, Dana Sosial Ummul Qura, Yayasan Dana Sosial Al Falah, Lembaga Pembangunan Umat dan Amil Zakat Nasional Pos Keadilan Peduli Umat, Dompot Peduli Umat Darurat Tauhid, dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam meningkatkan rasa percaya *muzakki* terhadap LAZ.⁷ Inovasi dari program-program LAZ ternyata mampu memberi daya tarik kepada para *muzakki* melalui program Super Qurban yang ditawarkan oleh Rumah Zakat Indonesia. Transparansi dalam menjalankan amanah sebagaimana sekarang ini banyak LAZ yang menyampaikan laporan bulanan kepada *muzakki* dengan memanfaatkan akses internet yang telah ada.⁸

LAZISNU Kecamatan Dawe menjadi satu dari sekian filantropi Islam Indonesia khususnya di kawasan Kudus yang turut mewarnai perjalanan LAZ di Indonesia dalam menunjukkan semangat untuk menumbuhkan kesadaran umat dalam berzakat. LAZISNU merupakan filantropi Islam bentukan dari ormas Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama atau dikenal dengan NU.

Setiap lembaga tentunya memiliki kebijakan dalam menerapkan pengelolaan dan program-program unggulannya. Secara umum LAZISNU telah mencanangkan program NU-CARE. Melalui program NU peduli ini, LAZISNU menghadirkan wujud kepedulian terhadap pelayanan kesehatan

⁷ Sari Viciawati Machdum "Upaya Pengaruh Eksistensi Lembaga Amil Zakat Sebagai Salah Satu Bentuk Faith Based Organization di Indonesia" *EMPATI Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 2 no. 1(2013): 21, diakses pada 15 April 2020 melalui <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/empati/article/view/9753>.

⁸ Ramadhita, "Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial":30.

kepada masyarakat dengan menyediakan akomodasi berupa mobil layanan umat. Banyak masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya layanan kesehatan ini. Masyarakat tidak lagi kesusahan untuk mencari kendaraan bagi keluarga yang sedang sakit. Sebagaimana masyarakat yang telah merasakan pelayanannya, LAZISNU tidak memungut biaya sehingga masyarakat yang kekurangan sangat terbantu.

Menariknya pengembangan layanan kesehatan ini berjalan cukup pesat berkat pengadaan program kreatif dari NU sendiri berupa gerakan KOIN NU. Keberadaan gerakan KOIN NU di LAZISNU Kecamatan Dawe menjadi semangat baru bagi lembaga. Dua keuntungan sekaligus didapatkan, pertama LAZISNU mendapatkan pemasukan dana yang lebih dan berkala berkat penghimpunan KOIN NU sendiri, kedua selama proses penghimpunan secara tidak langsung LAZISNU dapat memperkenalkan program-programnya kepada masyarakat, sehingga kedekatan terhadap masyarakat dapat terjalin dan kepercayaan lebih mudah didapatkan.

KOIN NU merupakan kepanjangan kotak infak Nahdhatul Ulama. Awal tercetusnya program ini tak lepas dari keberadaan warga nahdliyin yang mendominasi, namun masih sulit untuk berdiri sendiri dibalik NU yang begitu besar. Hal ini terjadi karena mayoritas warga NU adalah masyarakat ekonomi menengah. Rais 'Aam PBNU, KH. Ma'ruf Amin pernah menyampaikan bahwa gerakan KOIN NU ini menjadi arus baru dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Nusantara yang nantinya diharapkan sebagai program andalan inovatif dalam menjawab persoalan yang tengah dihadapi. Melalui KOIN NU ini masyarakat secara langsung dapat merasakan dampaknya, karena diperoleh dari masyarakat dikelola bersama masyarakat dan manfaatnya kepada masyarakat sendiri.⁹

Pelaksanaan gerakan KOIN NU di LAZISNU Kecamatan Dawe adalah bidikan yang tepat sasaran, mengingat mayoritas penduduk kecamatan dawe adalah warga NU, ajaran dan amalan NU masih terus lestari dan masih banyak

⁹ "Gerakan Koin NU, Upaya Wujudkan Kemandirian Nahdliyin" NU Online, 14 Maret 2018, diakses pada 26 maret 2020 melalui <https://www.nu.or.id/post/read/87183/gerakan-koin-nu-upaya-wujudkan-kemandirian-nahdliyin>.

masyarakat ekonomi menengah. Keberadaan KOIN NU mampu membuka kepedulian masyarakat dan menepis stigma bahwa untuk membantu tidak menunggu memiliki harta yang melimpah. Tetapi kepedulian dimulai dari hal yang terkecil yang terus dipupuk sehingga menjadi besar dan kaya manfaat.

KOIN NU adalah gerakan baru. Gerakan ini perlu mendapatkan pengelolaan yang maksimal sehingga mampu mengajak masa yang lebih besar lagi dan untuk membuktikan KOIN NU ternyata memiliki kemanfaatan yang sama seperti halnya dana ZIS. Namun karena ini adalah gerakan baru, juga tidak terlepas dari berbagai hambatan dan permasalahan. Seperti hasil skripsi yang ditulis oleh Wahyu Wulandari dengan judul “analisis pelaksanaan pengelolaan KOIN NU di kecamatan Gemolong dalam perspektif hukum Islam” memaparkan bahwa permasalahan ditemukan pada aspek pentasarufan kurang terencana hingga menimbulkan keraguan masyarakat pada KOIN yang sudah terhimpun.¹⁰

Lagi-lagi setiap organisasi pengelola zakat problem yang dihadapi adalah terletak pada setiap proses pengelolannya. Begitupun pada KOIN NU permasalahan yang sama masih saja dijumpai yaitu terletak pada pengelolaan yang telah berjalan. Dari pemaparan latar belakang di atas, peneliti berusaha untuk mencari tahu informasi terkait pengelolaan KOIN NU di LAZISNU Kecamatan Dawe sehingga dapat mengetahui bagaimana pengelolaan yang telah dilakukan dalam membantu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang kemudian dituangkan dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Pengelolaan KOIN NU di LAZISNU Kecamatan Dawe dalam Membantu Pelayanan Kesehatan Masyarakat*”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul “Analisis Pengelolaan KOIN NU di LAZISNU Kecamatan Dawe dalam Membantu Pelayanan Kesehatan Masyarakat”. Fokus penelitian ini disesuaikan dengan pengelolaan KOIN NU di LAZISNU

¹⁰ Wahyu Wulandari, “Analisis Pelaksanaan Pengelolaan KOIN NU di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, IAIN Salatiga, 2018), 5 diakses pada 18 Februari 2020 melalui <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/4678/1/WULAN.pdf>.

Kecamatan Dawe dalam membantu pelayanan kesehatan masyarakat.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan KOIN NU di LAZISNU Kecamatan Dawe dalam membantu Pelayanan Kesehatan Masyarakat?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pengelolaan KOIN NU di LAZISNU Kecamatan Dawe dalam membantu Pelayanan Kesehatan Masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan KOIN NU di LAZISNU Kecamatan Dawe dalam membantu pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan KOIN NU di LAZISNU Kecamatan Dawe dalam membantu Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya sebagai sumbangan pemikiran yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam lingkup manajemen dakwah melalui pengelolaan KOIN NU di LAZISNU Kecamatan Dawe dalam membantu pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Melalui penelitian ini penulis secara khusus dapat mengetahui dan mendapatkan wawasan tentang pengelolaan KOIN NU di LAZISNU Kecamatan Dawe dalam membantu pelayanan kesehatan masyarakat, dan memberikan informasi kepada masyarakat luas.
 - b. Penelitian ini dapat berguna bagi pembaca yang diharapkan bisa menjadi bahan masukan untuk

dijadikan landasan pada pelaksanaan pengelolaan dalam pemikiran manajemen dakwah.

F. Sistematika Penulisan

1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari: Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Halaman Keaslian, Abstrak, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Halaman Kata Pengantar, dan Daftar Isi.

2. Bagian Utama

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini berisi tentang: Kajian Teori, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang: Jenis dan Pendekatan Penelitian, *Setting* Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang: Gambaran Objek Penelitian, Deskripsi Data Penelitian, dan Analisis Data Penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang: Kesimpulan dan Saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini terdiri dari: Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, Transkrip Wawancara, Catatan Observasi, Foto dan lainnya.